

ABSTRAK

Mariana: Pelaksanaan Penertiban Reklame di Kota Bandung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dihubungkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Seiring dengan kemajuan serta perkembangan dunia bisnis di Indonesia khususnya Kota Bandung, semakin maju pula pendirian papan-papan reklame baik isidentil maupun permanen. Pemasangan papan-papan reklame saat ini semakin banyak dan menumpuk tanpa memperhatikan prosedur penyelenggaraan reklame yang telah ditentukan. Sehingga perlu dilakukan pengawasan atau penertiban, penertiban ini merupakan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 dalam Pasal 19 ayat (1) Tantang pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame Akan tetapi pada kenyatannya dalam penyelenggaraan reklame masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur pemasangan dan belum semua pelanggaran penyelenggara reklame dapat ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP Kota Bandung dan untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penertiban pelanggaran penyelenggara reklame di Satpol PP Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran diantaranya adalah teori Pemerintahan Daerah, teori Efektivitas Hukum yaitu Faktor penegak hukum (yang melaksanakan atau menjalankan hukum), Faktor sarana dan fasilitas (yang mendukung penegakan hukum), Faktor masyarakat (yakni masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan), Faktor kebudayaan (yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya Teori Pamong Praja sebagai pelaksana dalam penertiban reklame dan Teori Penegakan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data primer dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa referensi buku-buku dengan tema penelitian untuk mendukung data sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame belum dapat optimal, ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran penyelenggara reklame di Kota Bandung. Hal ini disebabkan karna kurangnya personil serta sarana dan prasarana. Adapun cara penanggulangannya adalah harus adanya penambahan personil atau pegawai penertiban reklame serta penyediaan peralatan yang memadai guna mendukung dalam pelaksanaan penertiban reklame dilapangan.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Satpol PP, Pelaksanaan, Penertiban, Reklame*

ABSTRACT

Mariana: Implementation of the regulation of billboards in the city of Bandung by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of the city of Bandung is connected with Regional Regulation (Perda) Number 11 of 2005 concerning Order, Cleanliness and Beauty

Along with the progress and development of the business world in Indonesia, especially the city of Bandung, the establishment of billboards both content and permanent is also more advanced. The installation of billboards is now more and more and more piled up without paying attention to the procedures for organizing billboards that have been determined. So it is necessary to supervise or control, this regulation is an obligation of the Bandung City Civil Service Police Unit (Satpol PP) as stated in Bandung City Regional Regulation Number 02 of 2017 in Article 19 paragraph (1) Challenge the implementation of the regulation of the implementation of billboards However, in fact in the implementation of billboards there are still many people who do not follow the installation procedures and not all violations of the billboard organizers can be put in order by Satpol PP Bandung City.

The purpose of this study is to determine the implementation of billboard regulation by Satpol PP Bandung City and to determine the supporting and inhibiting factors in regulating violations of billboard organizers at Satpol PP Bandung City. This research uses a framework of thought including the theory of Local Government, the theory of Law Effectiveness, namely Law enforcement factors (who implement or implement the law), Facilities and facilities factors (which support law enforcement), Community factors (namely the community where the law is applied), Cultural factors (namely as a result of work, creation and charities based on human charities in the association of life. Furthermore, Civil Service Theory as an implementer in regulating billboards and Law Enforcement Theory

The method used in this study is a descriptive method of analysis and the approach in this study uses a normative juridical approach with a qualitative type of research. This is done in order to collect primary data by means of observation, interviews and documentation. In addition, data collection was carried out using several references to books with research themes to support previous data.

The results showed that Satpol PP Bandung City in the Implementation of Billboard Control has not been optimal, this is evidenced by the many violations of billboard organizers in Bandung City. This is due to the lack of personnel and facilities and infrastructure. The way to overcome it is that there must be additional personnel or employees of billboard control and the provision of adequate equipment to support the implementation of billboard control in the field.

Keywords: *Regional Regulation, Satpol PP, Implementation, Regulation, Billboard*